

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Indeks Pembangunan Manusia**

##### **1. Konsep Pembangunan Manusia**

Menurut Todaro (1998) sebagian besar ekonom sepakat bahwa bukan modal fisik ataupun sumber daya manusia material yang menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Hal tersebut atas dasar keyakinan ekonom tersebut antara lain nampak jelas pada pernyataan Profesor Frederick Harbison dari Universitas Princeton sebagai berikut: Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang pada dasarnya bersifat pasif; manusialah yang merupakan agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun berbagai macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan pembangunan nasional. Jelas bahwa jika suatu negara tidak segera mengembangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya dan tidak memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi nasional, maka negara tersebut tidak akan dapat mengembangkan apapun.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam dan kapasitas produksi yang terpasang dalam masyarakat yang bersangkutan. Keempat faktor dinamika itu harus dilihat dalam kaitan interaksinya satu dengan yang lainnya. Namun, diantaranya peranan sumber daya manusia mengambil tempat yang sentral, khususnya dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang dimana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam ekonomi masyarakat. Berpangkal dalam haluan ini masalah penduduk dan angkatan kerja, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, wajib diberi perhatian utama dalam ekonomi pembangunan. Dalam hubungan ini, yang paling dominan adalah masalah kesempatan kerja produktif. Negara-negara berkembang pada umumnya masih terus mengalami penambahan penduduk. Dengan sendirinya, kebutuhan masyarakat menjadi semakin banyak mengenai serangkaian keperluan hidup yang sifatnya sangat mendasar, seperti: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Jika dulu ada kecenderungan untuk mengelompokkan pendidikan dan kesehatan dalam kategori kebutuhan sosial, maka dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang kedua jenis kebutuhan dasar itu harus dianggap termasuk prioritas ekonomi yang utama. Sebab, peningkatan mutu

pendidikan dan pelayanan kesehatan amat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (Djojohadikusumo, 1994).

Pembangunan manusia mempunyai arti yang sangat luas. Pembangunan manusia tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk dan pendidikan saja, namun meliputi pandangan hidup mereka, tingkat kebudayaan, sikap-sikap atau penilaian mereka terhadap pekerjaan, dan besar kecilnya keinginan untuk memperbaiki diri secara kreatif dan otonom. Selain itu, tingkat kecakapan dan administratif juga merupakan salah satu bentuk sumber daya manusia yang penting karena hal tersebut seringkali menentukan kemampuan dan ketepatan waktu pemerintah dalam memperbaiki struktur produksi secara keseluruhan. Apabila membahas mengenai sumber daya manusia, itu berarti kita juga membahas mengenai beberapa faktor, seperti: kebudayaan, tradisi, agama, suku-suku bangsa, dan aneka faktor primordial lainnya. Dengan demikian, jelas bahwa kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di dalam suatu negara merupakan salah satu determinan yang paling penting atas keandalan struktur perokonomian (Todaro dan Smith, 2003).

Konsep Pembangunan manusia direkomendasikan oleh *United Nation Development Program (UNDP)* terdiri dari 4 komponen, yaitu: kesetaraan memperoleh akses sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar Negara, produktivitas yang merupakan usaha-usaha yang bertujuan meningkatkan

kegiatan ekonomi, pemberdayaan yang merupakan upaya untuk membangun kualitas masyarakat dengan cara melakukan perubahan potensi dan kemampuan masyarakat, dan berkelanjutan yang berarti bahwa dalam mengelola modal pembangunan manusia, bisa dimanfaatkan pada periode-periode selanjutnya (Adelfina dan Jember, 2014).

Indeks Pembangunan Manusia adalah parameter untuk mengukur kualitas perkembangan manusia dari hasil pembangunan ekonomi. Menurut Sari dan Sufadmi (2016) penilaian IPM dapat dilihat dari rentang angka 0 hingga 100. Apabila perolehan angka IPM dekat dengan angka 100, maka dapat diprediksi pembangunan manusia di suatu daerah sudah tercapai. Menurut Basuki dan Saptutyingsih (2015) IPM dapat di bagi menjadi empat kategori sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS, diantaranya: kategori pertama yaitu kategori bawah yang perolehan IPM tidak lebih dari 50 ( $IPM < 50$ ), selanjutnya kategori kedua yaitu kategori rata-rata rendah dengan perolehan IPM lebih dari 50 akan tetapi tidak lebih dari 66 ( $50 < ipm < 60$ ), kategori ketiga adalah kategori rata-rata atas yang perolehan IPM lebih dari 66 akan tetapi tidak lebih dari 80 ( $66 < IPM < 80$ ), kategori terakhir adalah kategori atas/tinggi yang perolehan IPM lebih dari 80 ke atas ( $IPM > 80$ ).

Kebijakan pokok dalam upaya peningkatan kualitas hidup Sumber Daya Manusia (SDM) secara lintas sektoral, diantaranya:

(1) Peningkatan Kualitas Fisik Individu (*Individual Fisycal Quality*) meliputi jasmani, rohani, dan motivasi, serta kebutuhan dasar seperti terpenuhinya gizi, sandang, perumahan, dan pemukiman yang sehat; (2) Peningkatan Kualitas Keterampilan (*Skills*) Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan upaya pemerataan penyebarannya; (3) Peningkatan Kualitas dan Teknologi (Iptek) yang berwawasan lingkungan; serta (4) Peningkatan pranata dan penerapan hukum yang meliputi kelembagaan, perangkat dan aparat, serta kepastian hukum. Sedangkan secara sektoral, operasionalnya dilaksanakan melalui berbagai program sektor pembangunan, antara lain: sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kependudukan, tenaga kerja, dan sektor-sektor pembangunan lainnya. Kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup tercermin dalam: (1) Bidang Pendidikan, yaitu melalui peningkatan pendidikan yang memerhatikan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan dinamika dan permintaan pasar (*drive demand*) serta arah dan sasaran-sasaran pembangunan ekonomi dimasa mendatang; (2) Bidang Kesehatan, yaitu melalui peningkatan budaya hidup sehat, penyediaan sarana dan prasarana, obat-obatan dan memperluas akses kesempatan dan mutu pelayananan kesehatan terutama jaminan kesehatan kepada penduduk miskin dan daerah terpencil; (3) Bidang Pengentasan Kemiskinan, yaitu melalui peningkatan keterampilan praktis,

menumbuhkan sikap produktif, serta mendorong semangat kemandirian dan kerja sama (gotong royong); (4) Bidang Kependudukan, yaitu melalui kesadaran melaksanakan program gerakan keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pemerataan penyebaran penduduk untuk keseimbangan geopolitik antara lain melalui program transmigrasi dan pembangunan industri di pedesaan (Mulyadi, 2014).

## 2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Basuki dan Saptutyingsih (2014) IPM diukur dari tiga komponen yaitu:

- 1) Lamanya hidup diukur dengan harapan hidup pada saat lahir.
- 2) Tingkat pendidikan diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah.
- 3) Dimensi standar hidup layak ditunjukkan oleh pengeluaran riil perkapita, yang dibakukan dalam indeks pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016) setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Dimensi Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}} \dots\dots\dots(1)$$

b. Dimensi Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{AHLS_{maks} - HLS_{min}} \dots\dots\dots(2)$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \dots\dots\dots(3)$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2} \dots\dots\dots(4)$$

c. Dimensi Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - (\ln(pengeluaran_{min}))}{2} \dots\dots\dots(5)$$

Untuk menghitung IPM sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{(kesehatan \times pendidikan \times pengeluaran)} \dots\dots\dots(6)$$

**3. Hubungan Antar Variabel**

**a. Hubungan PDRB terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam menganalisis keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan jenis barang-barang ekonomi yang semakin banyak kepada penduduknya. Kemampuan ini dapat tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi,

penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukan. Definisi di atas mempunyai tiga komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus-menerus; *kedua*, teknologi maju dalam penyediaan berbagai macam barang kepada penduduk mampu dijadikan penentu derajat pertumbuhan; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien mampu menghasilkan inovasi yang mampu dimanfaatkan oleh ilmu pengetahuan manusia dan dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

Menurut Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah peningkatan hasil atau output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi dan digunakan dalam proses produksi masyarakat. Terdapat tiga komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap bangsa, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Akumulasi modal, meliputi modal manusia atau sumber daya manusia, dan semua bentuk atau jenis investasi.
- 2) Pertumbuhan penduduk, yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- 3) Kemajuan teknologi, yang akan mendukung proses pembangunan ekonomi.

Suatu kuantitas atau produk merupakan fungsi dari beberapa faktor produksi seperti halnya tenaga kerja, tanah, modal, teknologi dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya bersumber dari :

- 1) Jumlah penduduk atau sumber daya insani atau tenaga kerja.  
Tenaga kerja dalam hal ini merupakan sumber produksi karena tenaga kerja yang mampu mengolah sumber daya alam dan modal.
- 2) Jumlah *entrepreneur* atau pengusaha, yaitu orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengelola faktor produksi (tenaga, modal dan tanah) untuk menghasilkan sesuatu. Tanpa adanya *entrepreneur*, faktor produksi tidak akan menjadi produktif.
- 3) Sumber daya kapital atau modal, merupakan sumber kebutuhan yang penting. Semakin banyak capital maka akan semakin banyak produk atau GDP yang dihasilkan.
- 4) Sumber daya alam baik tanah, air dan mineral (minyak, emas, batubara, bauksit, dll) menjadi faktor produksi. Semakin banyak sumber daya alam maka produk suatu negara akan semakin tinggi.
- 5) Sumber daya teknologi, karena hal ini mampu meningkatkan kapasitas produksi (Hudiyanto, 2015).

Menurut Sukirno (2006), terdapat enam ciri pertumbuhan yang muncul dalam analisis yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, dimana ciri-ciri tersebut seringkali terikat satu sama lain. Ke enam ciri tersebut diantaranya :

- 1) Laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan produk per kapita yang tinggi.
- 2) Peningkatan produktifitas yang ditandai dengan meningkatnya laju produk perkapita.
- 3) Laju perubahan struktural yang tinggi dimana hal ini mencakup kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa dan peralihan usaha-usaha perorangan menjadi perusahaan yang berbadan hukum serta perubahan status kerja buruh.
- 4) Tingkat urbanisasi meningkat.
- 5) Ekspansi dari negara lain.
- 6) Peningkatan arus barang, modal dan orang antar bangsa.

Teori pertumbuhan ekonomi yang berkembang antara lain :

- 1) Teori Adam Smith

Dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation*", ia mengemukakan tentang teori pertumbuhan. Terdapat dua faktor yang saling berkaitan dalam teori pertumbuhan ekonomi, yaitu

pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Dalam pencapaian pertumbuhan output ini dipengaruhi beberapa komponen, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja dan pertumbuhan penduduk serta jumlah persediaan (Sukirno, 2006).

Menurut Adam Smith terdapat hubungan keterkaitan satu sama lain pada proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk pada fungsi kendala yaitu sumber daya ekonomi. Keterbatasan sumber daya ekonomi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena hal ini akan menurunkan jumlah produksi. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan karena sumber daya alam tidak mampu mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada (Kuncoro, 1997).

## 2) Teori David Ricardo dan T.R Malthus

David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan terus mengalami peningkatan hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat sehingga menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. David Ricardo ini memiliki satu pemikiran dengan Thomas Robert Malthus, dalam teorinya ia menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret

hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas, dan seterusnya). Pada akhirnya perpacuan antara pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output akan dimenangkan oleh pertumbuhan penduduk. Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumber daya alam) tidak bisa bertambah, hingga akhirnya menjadi faktor yang membatasi proses pertumbuhan suatu masyarakat (Arsyad, 1999).

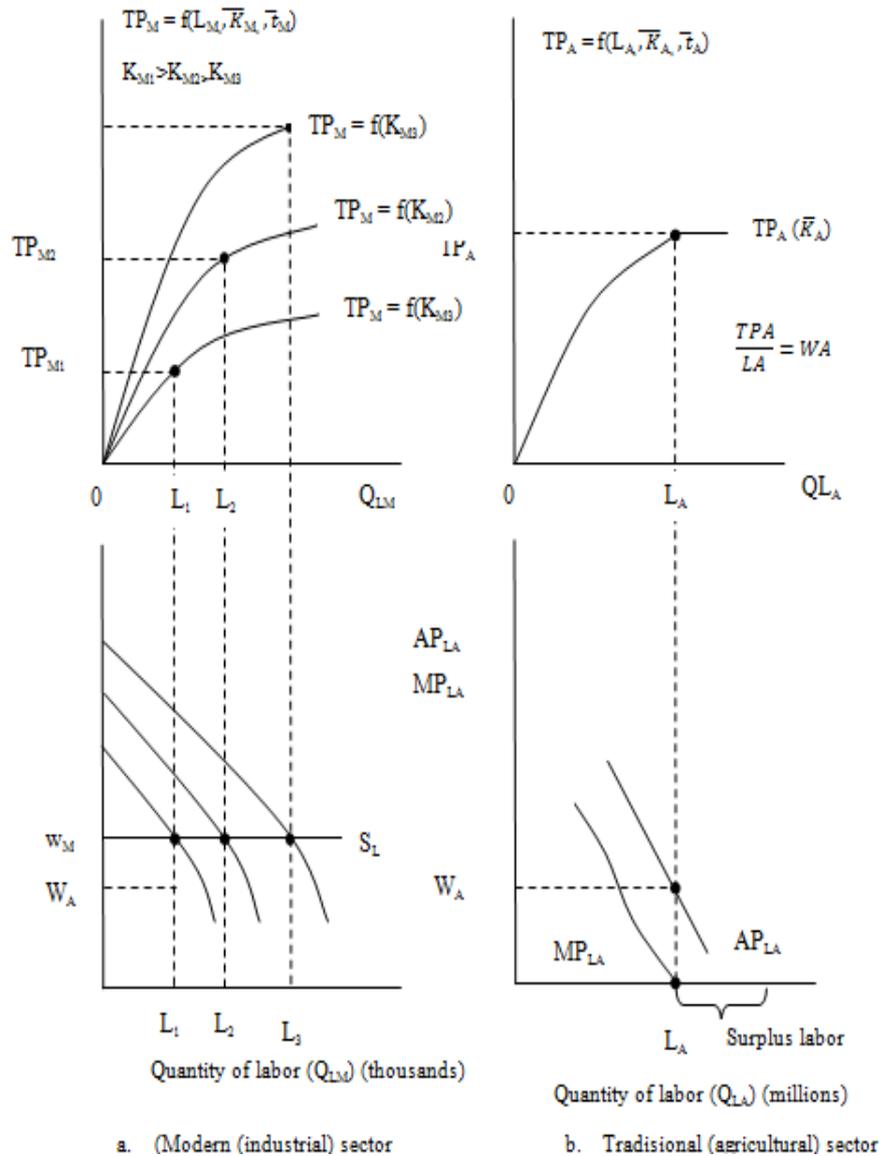
Malthus juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa berlangsung secara terus menerus karena adanya batasan lingkungan. Jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka sumber daya alam juga akan mengalami peningkatan eksploitasi dan limbah atau polusi yang kembali ke bumi atau lingkungan akan semakin meningkat juga. Eksploitasi sumber daya alam yang tersedia akhirnya menghancurkan sistem ekonomi (Sukirno, 2006).

### 3) Teori Arthur Lewis

Arthur Lewis mengasumsikan beberapa hal :

- a) Suatu perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu modern dan tradisional.
- b) Faktor utama dalam produksi yaitu modal dan tenaga kerja.
- c) Pada sektor pertanian terdapat surplus tenaga kerja.

- d) Terjadi akumulasi kapital.
- e) Sektor modern memiliki tingkat upah yang lebih tinggi.
- f) Sektor tradisional pada umumnya memiliki tingkat upah yang konstan (Hudiyanto, 2015).



Sumber : (Kuncoro, 1997)

**Gambar 2.1**  
Model Teori Lewis

Gambar (a) di atas merupakan kurva tingkat total produk dari sektor modern. O'TP1 merupakan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan total produk pada saat jumlah capital mencapai K1 adalah sebesar O'L1. Sesuai dengan teori Lewis, tingkat akumulasi capital akan terus

meningkat dari K1 ke K2 dan seterusnya, hal ini dikarenakan berlakunya asumsi mengenai pengusaha akan menginvestasikan kembali keuntungannya ke industri tersebut. Hal ini akan menyebabkan total produk akan meningkat dari TP1 ke TP2 dan seterusnya. Dengan kurva total produk yang akan dapat diturunkan oleh kurva produk marginal. Dalam pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna di sektor modern maka kurva produk marginal akan menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja (Todaro, 1991 dalam Kuncoro, 1997).

Segmentasi sebesar OA pada diagram (a) dan (b) bagian bawah, menunjukkan tingkat subsistensi pendapatan di sektor pertanian yang tradisional. Segmentasi OW menunjukkan tingkat upah riil yang terjadi di sektor perkotaan. Dengan konfigurasi upah seperti itu, diasumsikan penawaran tenaga kerja di sektor pedesaan memiliki elastisitas yang sempurna, dengan kata lain penawaran tenaga kerja tidak terbatas (Kuncoro, 1997).

Tingkat keuntungan maksimal pengusaha di perkotaan akan terjadi pada saat *marginal physical product* (produk fisik marginal) sama dengan upah buruh. Titik F, G dan H, pada diagram (a) sebelah bawah menunjukkan tingkat keseimbangan tenaga kerja, yaitu pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran tenaga kerja. Pada saat total produk sebesar O'TP1

(K1), kurva permintaan tenaga kerja dicerminkan oleh kurva D1. Pada saat itu jumlah tenaga kerja yang dapat diserap adalah OL1. Daerah segi empat OWFL1 merupakan pengeluaran untuk upah total yang dikeluarkan oleh pengusaha, artinya total penerimaan dari semua tenaga kerja yang bekerja di sektor modern pada tingkat upah OW. Segitiga WD1F adalah total keuntungan yang diperoleh pengusaha. Jika asumsi dasar bahwa keuntungan yang diperoleh pengusaha akan diinvestasikan kembali, maka modal yang digunakan pada proses produksi meningkat menjadi k2. Hal ini menunjukkan tingkat produksi total adalah O'TP2, dengan mempekerjakan pekerja sebanyak OL2, yang berarti mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja dari D1 ke D2. Konsekuensinya jumlah yang mampu diserap oleh sektor modern akan meningkat, meski pada tingkat upah yang tetap. Di sisi lain pengusaha mengalami peningkatan keuntungan yang kemudian akan diinvestasikan lagi ke sektor tersebut. Proses pertumbuhan sektor modern di atas dan mengalirnya arus tenaga kerja yang berurbanisasi diasumsikan akan terus berlanjut sampai surplus tenaga kerja yang terjadi di pedesaan terserap sepenuhnya oleh sektor modern (Kuncoro, 1997).

Arthur Lewis menyimpulkan bahwa ketika kapitalis meningkat kesejahteraannya, kehidupan buruh tetap pas-pasan.

Pertumbuhan ekonomi seperti ini akan terus berlangsung. Situasinya akan berubah yaitu upah buruh naik ketika tidak ada lagi surplus tenaga kerja, sektor modern berkembang amat cepat sehingga mengurangi penduduk sektor tradisional dengan cukup signifikan, dan sektor tradisional menggunakan teknik baru sehingga upah riil buruh sektor pertanian meningkat (Hudiyanto, 2015).

#### 4) Teori Harrod Domar

Teori ini sebenarnya melengkapi analisis Keynes mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Teori Keynes pada hakikatnya menentukan dan menerangkan bahwa perbelanjaan agregat akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Keynes mencoba mengembangkan bagaimana konsumsi rumah tangga dan investasi perusahaan akan menentukan tingkat pendapatan nasional. Harrod Domar berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tingkat tabungan dan investasi. Maka setiap perekonomian haruslah menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin dari GNP-nya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan ekonomi itu akan semakin cepat (Todaro, 1998).

#### 5) Teori Rostow

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan suatu proses yang multi-dimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya terjadi pada perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja (Arsyad, 1999).

Rostow mencatat adanya tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh setiap negara :

- a) Tahap masyarakat tradisional, yaitu dimana dalam memproduksi suatu barang masyarakatnya masih menggunakan cara yang primitif.
- b) Tahap prasyarat lepas landas, yaitu tahap memasuki pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus tumbuh.
- c) Tahap lepas landas, yaitu tahap yang telah berhasil menyingkirkan hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi.
- d) Tahap dorongan kearah kedewasaan, yaitu muncul diversifikasi produk pada industri jasa.
- e) Tahap konsumsi massal yang tinggi, yaitu tahap dimana sektor industri mendominasi perekonomian (Hudiyanto, 2015).

## 6) Teori Joseph Schumpeter

J. Schumpeter berpendapat bahwa tanpa adanya inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh adanya proses inovasi-inovasi di bidang teknologi produksi yang dilakukan oleh para pengusaha. Inovasi yang dimaksud dapat berupa : (a) Penemuan produk baru, (b) Penemuan sumber bahan baku baru, (c) Penemuan teknik produksi baru, (d) Penemuan pasar baru, maupun (e) Penemuan manajemen baru yang lebih efisien (Hudiyanto, 2015).

Potensi ekonomi merupakan unsur yang penting dalam mempercepat lajunya pembangunan ekonomi. Sektor unggulan atau sektor yang memiliki kontribusi paling besar dalam perekonomian menjadi prioritas untuk pembangunan. Selain dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, imbasnya akan lebih cepat mendorong perkembangan sektor usaha lainnya. Selain itu, potensi ekonomi juga perlu diperhatikan dalam perkembangan ekonomi. Sehingga pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan proses memaksimalkan kapasitas ekonomi yang dapat menciptakan nilai tambah tinggi dan menciptakan lapangan usaha yang dapat mensejahterakan masyarakat. Adapun salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan perekonomian maupun

yang menjadi ukuran dalam kesejahteraan secara makro yaitu Produk Domestik Regional Bruto.

PDRB merupakan konsep yang sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat ekonomi penduduk di suatu negara. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian (baik yang dilakukan oleh penduduk warga negara maupun orang-orang dari negara lain yang bermukim di negara yang bersangkutan) (Todaro dan Smith, 2003).

Menurut Hudiyanto (2015) PDRB dapat dibedakan menjadi tiga pendekatan yaitu:

- 1) Pendekatan pendapatan (*income approach*) yaitu berapa nilai pendapatan dari semua orang (gaji, bunga, dan sewa).
- 2) Pendekatan pengeluaran (*expenditura approach*), yaitu berapa jumlah uang yang dikeluarkan oleh semua pelaku ekonomi untuk membeli barang dan jasa (konsumen, pemerintah, dan investasi dunia bisnis).
- 3) Pendekatan produksi (*production approach*), yaitu berapa nilai produksi dari barang dan jasa dalam negeri itu.

Pembangunan manusia sangat erat kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja. Dengan tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan

ekonomi melalui kapasitas penduduk dan konsekuensinya akan terjadi peningkatan jumlah produktivitas dan kreativitas masyarakat setempat. Dengan meningkatnya produktivitas, maka penduduk dapat bekerja dan mengolah sumber daya menjadi barang yang berdaya guna tinggi bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi akan mengubah pola konsumsi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Daya beli masyarakat berkaitan erat dengan IPM, karena daya beli merupakan salah satu indikator dalam IPM yaitu indikator pendapatan (Todara, 2003).

**b. Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh swasta dan ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan dan didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Bilamana pendapatan bertambah, konsumsi juga bertambah dan bertambah pulalah *effective demand*. Investasi yang ditimbulkan oleh sebab bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan disebut *Induced Investment* dan ini mungkin dilakukan oleh *public* maupun *private* (Laily dan Prityadi, 2013). Menurut Yuliadi (2012) peranan investasi PMA sangat penting dalam pengembangan perekonomian untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi barang dan

jasa, mendorong peningkatan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penanaman modal asing adalah aliran dana dari perusahaan di luar negeri yang diwujudkan dalam cabang (*subsidiary*) perusahaan di negara lain (Hudiyanto, 2015). Pesatnya penanaman modal asing akan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan manusia. Tingginya minat investor asing menanamkan modalnya ke negara yang memiliki potensi sumber daya alam akan memberikan dampak positif, seperti: terbukanya lapangan pekerjaan, transfer ilmu pengetahuan, menambah pendapatan daerah/pusat. Selain itu, mampu mempercepat kemajuan daerah melalui perbaikan infrastruktur, penyediaan air bersih, tenaga listrik, sarana kesehatan, sarana pendidikan dan prasarana publik lainnya (Pujualwanto, 2014).

Menurut Sukirno (2006) investasi merupakan pengeluaran modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi dengan menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi asing di bagi menjadi tiga, yaitu: Portofolio, *Foreign Direct Investment* (FDI) dan kredit ekspor.

Menurut Alfaro dkk (2000) investasi asing langsung (FDI) memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka

panjang yang juga merupakan komponen makro ekonomi. Peningkatan produktivitas, keterampilan manajerial dan pengetahuan, transfer teknologi, pengenalan proses baru untuk pasar domestik, jaringan produksi Internasional dan akses pasar merupakan dampak positif dari adanya FDI. Adanya peningkatan FDI pada negara berkembang mendorong terwujudnya *labour intensive* yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat kapasitas output yang dihasilkan. Sehingga membuktikan bahwa FDI memiliki kontribusi yang penting terhadap perekonomian.

Hadirnya penanaman modal asing akan menjadi poin utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi khususnya negara berkembang. Dengan investasi asing negara berkembang dapat menerima transfer teknologi dari negara maju. Selain itu, hadirnya investor asing akan menambah pengetahuan masyarakat yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara efisien. Dengan demikian hadirnya investor asing akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga tepenuhinya kebutuhan masyarakat.

**c. Hubungan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Investasi merupakan langkah awal kegiatan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi yang

mencerminkan marak lesunya pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara akan berusaha menciptakan iklim yang dapat meningkatkan investasi. Sasaran yang ditujukan tidak hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, melainkan juga luar negeri (Dumairy, 1996).

Penanaman modal dalam negeri adalah sejumlah dana dari pemerintah pusat/daerah guna membiayai kebutuhan publik untuk proses pembangunan (Pujoalwanto, 2014). Tujuan utama penanaman modal dalam negeri ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (nasional), sebagai jaringan-jaringan jalan raya, irigasi, rumah sakit, pelabuhan dan lain sebagainya. Kegiatan investasi ini sering di sebut dengan *Social Overhead Capital* (SOC) (Laily dan Prityadi, 2013).

WHO menyimpulkan dalam *World Health Report* tahun 2000 tentang sistem kesehatan bahwa “Tanggung jawab utama atas kinerja sistem kesehatan suatu negara terletak di pundak pemerintah.” Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya adalah hal yang fundamental untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas

yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro dan Smith, 2003).

Menurut Mulyadi (2014) untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi (yang berupa peningkatan *output*) sesungguhnya tersedia banyak pilihan, antara lain dengan melakukan investasi sumber daya manusianya. Investasi ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Tetapi, investasi sumber daya manusia juga tidak akan terlepas dari kendala biaya, karena dana yang ada terbatas. Di samping itu, investasi sumber daya manusia bersifat jangka panjang, sehingga manfaatnya baru dapat dirasakan dalam waktu yang cukup lama. Dengan demikian risiko bahwa pendidikan yang ditempuh tidak sesuai lagi dengan kebutuhan menjadi cukup besar. Hal ini mengingat tingkat perubahan dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, sehingga pilihan pendidikan yang dirasa cocok dengan kebutuhan ataupun teknologi pada saat itu, bisa menjadi sia-sia ketika pendidikan tersebut selesai ditempuh. Meskipun demikian, investasi sumber daya manusia memberikan pilihan aplikasi berbiaya murah yang cukup bervariasi. Tidak semua investasi sumber daya manusia itu harus dilakukan dengan melalui pendidikan yang mahal. Pelatihan-pelatihan yang terarah, bersifat *short-term* dan dilakukan secara konsisten dengan orientasi kebutuhan yang terus-menerus

disesuaikan dengan perubahan yang terjadi, merupakan salah satu pilihan murah yang berdaya guna. Pada dasarnya sumber daya manusia tidak hanya berperan manusia sebagai faktor produksi tradisional, melainkan bagaimana sumber daya manusia mempunyai kemampuan berinovasi terus-menerus (*continus innovation capability*), penanaman modal (*capital acumulation*), pengembangan energi, teknik produk (*production technique*) serta manajemen. Inovasi ini dibutuhkan, betapapun kecilnya inovasi tersebut untuk mendorong pembangunan ekonomi yang berkesinambungan (*sustainable development*) dalam arti yang luas, lebih luas dari pada sekedar persoalan eksternalitas, melalui TFP yang berkembang secara terus-menerus.

#### **d. Hubungan Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan memang sudah diperluas. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan di negara-negara berkembang harus lebih mengutamakan kualitas pendidikan. Hal tersebut harus dilihat dalam kaitannya dengan serangkaian masalah yang harus ditanggulangi secara lebih mendasar. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya berkisar pada upaya untuk memperbaiki mutu tenaga pengajar dan membina motivasi golongan pengajar. Salah satu faktor mengapa di negara-negara berkembang mutu pengajar sering tidak memadai

dikarenakan gaji para guru yang sangat rendah dan jauh dari memuaskan. Perbaikan nasib guru terutama di sekolah dasar dan tingkat menengah dengan gaji yang wajar dan imbalan-imbalan jasa lainnya sudah seharusnya dijadikan prioritas utama dalam suatu kebijakan yang ditujukan pada peningkatan mutu sumber daya manusia. Pendidikan kejuruan dan pelatihan keterampilan menjadi jalur yang semakin berarti dalam usaha meningkatkan mutu angkatan kerja dan produktivitasnya dalam sistem ekonomi secara menyeluruh. Hal ini menyangkut kegiatan di sektor formal modern maupun di sektor informal yang meliputi produsen kecil dan menengah (Djojohadikusumo, 1994).

Di banyak negara berkembang, pendidikan formal adalah “industri” dan konsumen terbesar anggaran pemerintah. Bangsa-bangsa yang miskin telah menginvestasikan sejumlah uang yang sangat besar untuk bidang pendidikan. Alasannya sendiri bermacam-macam, para petani yang “melek huruf”, sekurang-kurangnya pernah mengenyam pendidikan dasar sehingga bisa baca-tulis. Dianggap akan lebih produktif serta lebih tanggap dalam menerima inovasi dan teknologi pertanian baru yang lebih produktif dibandingkan dengan petani-petani yang masih buta huruf. Tenaga-tenaga teknis (tukang) dan mekanik yang terlatih secara khusus dan dapat membaca serta menulis, juga dianggap akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan produk-produk, bahan

baku dasar, dan teknologi produksi yang terus berubah dan berkembang. Tamatan sekolah menengah pertama, dengan sedikit pengetahuan dalam hitung-menghitung dan keahlian administratif tentunya sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan teknis atas segenap organisasi swasta serta pemerintah, dan juga untuk menggantikan tenaga-tenaga asing dari negara-negara maju bekas penjajahnya. Tamatan universitas dengan tingkat pelatihan yang lebih tinggi juga sangat diperlukan dalam rangka mengelola dan mengembangkan organisasi-organisasi modern milik swasta dan pemerintah (Todaro, 1998).

Disamping adanya kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia (*manpower planning*), yakni untuk mendapatkan tenaga-tenaga kerja terdidik dalam berbagai tingkatan dalam rangka menyelenggarakan segenap kegiatan pembangunan, para anggota masyarakat sendiri, baik yang kaya maupun yang miskin, telah melakukan tekanan-tekanan politis yang sangat kuat terhadap pemerintah bagi penyediaan dan perluasan fasilitas sekolah. Hal ini terjadi di semua negara berkembang. Para orang tua semakin menyadari bahwa pada masa yang akan datang berbagai tempat kerja hanya mau menerima tenaga-tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan, sehingga mereka terlanjur berkeyakinan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin banyak ijazah atau sertifikat yang dimiliki

anak-anak mereka, maka akan semakin baik pula kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan berpendapatan tinggi dan jaminan hidup yang jauh lebih memuaskan. Bagi golongan miskin, pendidikan bahkan dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk mengangkat anak-anak mereka dari lembah kemiskinan (Todaro,1998).

Telaah mengenai peran pendidikan dalam pembangunan biasanya berpangkal pada saran pendapat bahwa pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan warga masyarakat mendapat kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupannya secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Satu sama lain akan mendukung terlaksananya pemerataan pendapatan masyarakat. Namun, saran pendapat yang secara umum diungkapkan tadi harus dikaji secara lebih terinci, khususnya dengan memperhatikan perimbangan-perimbangan keadaan yang pada tahap ini masih berlangsung di banyak negara berkembang. Kesempatan untuk pendidikan memang sudah amat di perluas, namun hal itu terutama dalam arti kuantitatif. Jalur-jalur pendidikan formal yang sudah meluas dengan berlipat belum juga menunjukkan hasil yang harus ditanggulangi secara lebih mendasar, pengangguran yang masih

cenderung meningkat dengan bertambahnya angkatan kerja yang keterampilannya masih terbatas. Pertambahan penduduk dan angkatan kerja mendesak ke arah penambahan tempat belajar. Dalam suatu tahap, hal itu memang dilakukan akan tetapi semata-mata secara kuantitatif dan tidak disertai oleh usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga mengakibatkan struktur pendidikan dan kurikulum yang ketinggalan zaman. Fenomena tersebut masih juga dialami oleh banyak negara maju, apalagi negara-negara berkembang yang dimasa lampau biasanya mengambil alih sistem pendidikan negara industri bekas penjajahannya. Oleh sebab itu, pendidikan dan pelatihan menjadi semakin tinggi bagi mereka yang berkecimpung dalam kegiatan informal yang menjadi ciri permanen dalam perekonomian negara-negara berkembang. Pembinaan mutu sumber daya manusia dalam rangka pembangunan ekonomi harus diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan dan meluaskan keterampilan teknis, keahlian profesional dan kecerdasan akademis dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh (Djojohadikusumo, 1994).

Tingkat pendidikan yang dienyam seseorang secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh perpaduan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah atau tingkat pendidikan yang diinginkan, yakni: (1) harapan bagi seorang siswa

yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern dimasa yang akan datang hal ini merupakan manfaat pendidikan individual (*private benefits of education*) bagi siswa atau keluarganya; serta (2) biaya-biaya sekolah, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung, yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan keluarganya. Sedangkan dari sisi penawaran, jumlah sekolah pada tingkat sekolah dasar, menengah dan universitas lebih banyak ditentukan oleh proses politik, yang sering tidak ada sangkut pautnya dengan kriteria ekonomi. Sehubungan dengan semakin besar dan kuatnya tekanan-tekanan politik yang diletakkan ke pundak pemerintah, maka kita dapat mengasumsikan dengan aman bahwa tingkat penawaran atau penyediaan tempat-tempat sekolah ini hanya dibatasi oleh kemampuan keuangan negara. Tingkat penawaran pendidikan dari pihak pemerintah itu sendiri sehingga menjadi anggaran belanja pemerintah untuk sektor pendidikan. Alokasi anggaran itulah yang akan dipengaruhi oleh tingkat permintaan agregat dari masyarakat terhadap pendidikan (Todaro, 1998).

Menurut Todaro (1998), permintaan atas pendidikan yang dianggap harus dicapai untuk mendapatkan pekerjaan berpenghasilan tinggi di sektor modern bagi seseorang sangat

ditentukan oleh kombinasi pengaruh dari empat variabel berikut ini:

- 1) Selisih pendapatan atau upah. Yang dimaksudkan di sini adalah perbedaan tingkat upah antara pekerjaan-pekerjaan yang ada di sektor modern dan sektor-sektor lain di luar sektor modern (perhatian keluarga, usaha-usaha wiraswasta di desa-desa maupun di kota dan sebagainya), yang untuk mudahnya dapat kita sebut sebagai sektor tradisional. Untuk memperoleh pekerjaan di sektor modern, tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang sangat menentukan. Sebaliknya, sektor tradisional tidak akan menghadapkan seorang calon pekerjanya dengan persyaratan pendidikan sektor tertentu. Semakin besar perbedaan penghasilan antara sektor modern dengan sektor tradisional, akan semakin besar juga permintaan terhadap pendidikan. Jadi, permintaan terhadap pendidikan mempunyai hubungan yang positif (berbanding lurus) dengan perbedaan upah antara sektor modern dengan sektor tradisional. Karena seperti yang kita ketahui dari studi-studi empiris, perbedaan upah ini dalam kenyataannya memang cukup besar, maka kita dapat memperkirakan tingkat permintaan terhadap pendidikan di negara-negara berkembang akan relatif tinggi.
- 2) Besar kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor modern. Seseorang yang berhasil menamatkan

pendidikan yang tarafnya cukup memadai untuk dijadikan bekal dalam memasuki pasar tenaga kerja di sektor modern, dengan sendirinya mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan berpenghasilan tinggi di kota dari pada seseorang yang tidak menamatkan pendidikannya. Akan tetapi, jika angka pengangguran di daerah perkotaan terus melonjak, atau jika penyerapan tenaga kerja tidak memadai untuk menyerap calon pekerja yang memiliki tingkat pendidikan yang disyaratkannya, maka kita perlu mengganti indikator perbedaan tingkat upah yang aktual dengan tingkat upah yang diharapkan (*expected income*). Karena, kemungkinan sukses dunia kerja berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran, maka terjadi hubungan penting, yakni bahwa tingkat permintaan terhadap pendidikan, katakanlah untuk para tamatan sekolah menengah, berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di kalangan tamatan sekolah menengah tersebut.

- 3) Biaya-biaya langsung pendidikan individual. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah segenap biaya moneter yang harus dipikul oleh siswa dan keluarganya untuk membiayai pendidikan. Biaya-biaya ini meliputi uang iuran sekolah, buku-buku, pakaian seragam, serta ongkos-ongkos lainnya. Dapat juga dengan segera bahwa tingkat permintaan terhadap

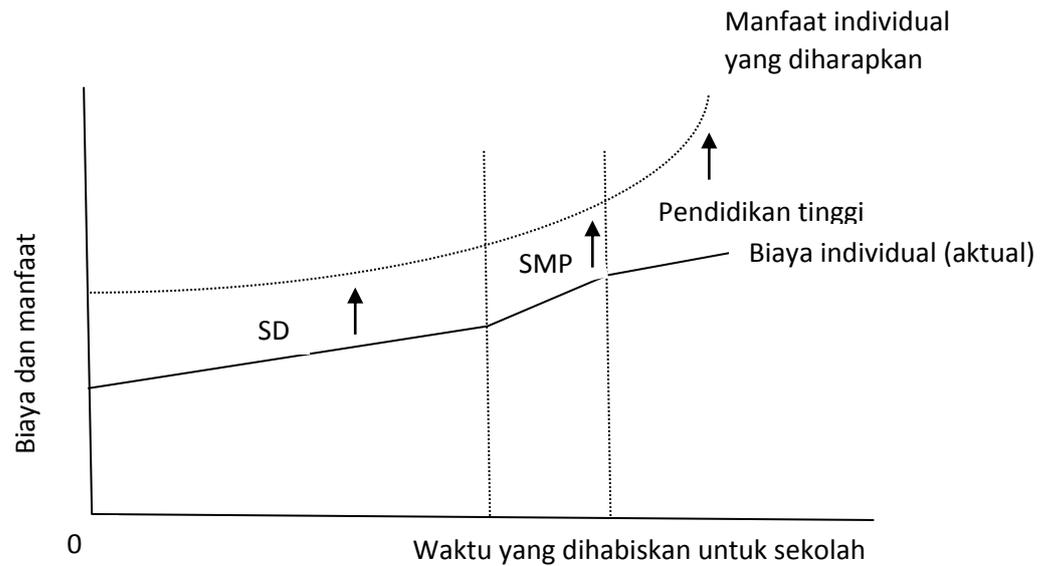
pendidikan berbanding terbalik dengan besarnya ongkos-ongkos yang bersifat langsung ini. Artinya, semakin tinggi biaya uang sekolah dan ongkos-ongkos lainnya, tingkat permintaan individual terhadap pendidikan akan semakin rendah, dengan asumsi hal-hal lainnya tetap atau konstan (*ceteris paribus*). Bagi penduduk yang berpenghasilan rendah, biaya-biaya langsung dari penyelenggaraan pendidikan tingkat dasar saja sudah merupakan beban berat yang menghabiskan sejumlah besar pendapatan riil mereka.

- 4) Biaya-biaya pendidikan yang bersifat tidak langsung atau biaya oportunitas (*opportunity cost*). Investasi dalam pendidikan seorang anak bukan hanya meliputi biaya langsung ataupun biaya-biaya moneter yang harus dikeluarkan secara nyata, akan tetapi juga biaya-biaya yang berupa pendapatan potensial yang harus dikorbankan, apalagi jika si anak sudah mencapai umur dimana ia mulai dapat memberikan sumbangan produktifnya kepada penghasilan keluarga. Pada tahap ini untuk setiap tahun si anak berada di sekolah akan berarti hilangnya sejumlah penghasilan yang sedianya dapat dihasilkan oleh si anak tersebut bila ia menggunakan waktunya untuk bekerja di tanah pertanian keluarganya. Biaya oportunitas pendidikan (*opportunity cost of education*) ini juga merupakan satu variabel penting yang senantiasa mempengaruhi permintaan

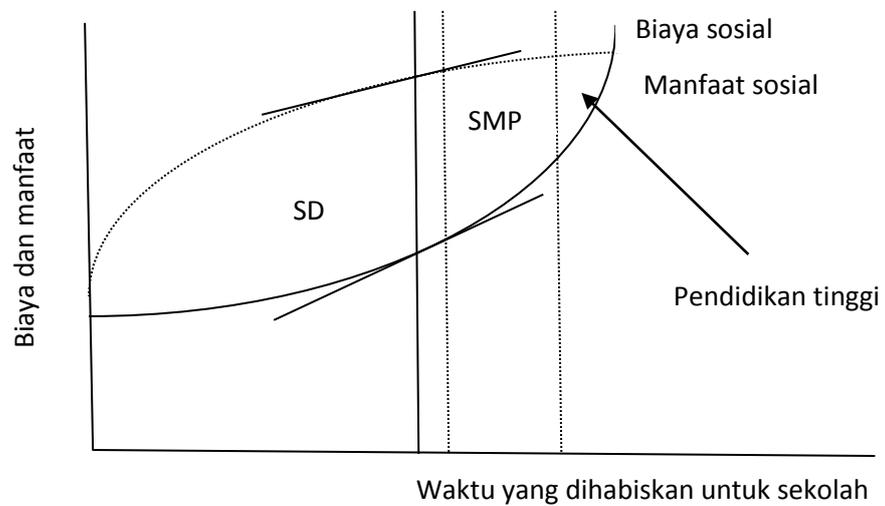
terhadap pendidikan. Maka kita dapat menduga bahwa bentuk hubungan antara biaya oportunitas dengan permintaan terhadap pendidikan adalah berbanding terbalik. Yaitu, semakin besar biaya oportunitas, tingkat permintaan terhadap pendidikan akan semakin kecil.

Daya tarik pendidikan tinggi yang sangat besar tersebut sebenarnya menimbulkan jauh lebih banyak biaya dari pada tersimpul melalui gambaran sederhana yang telah dipaparkan di atas. Jurang kesenjangan yang semakin melebar antara biaya individual dengan biaya sosial akan lebih memacu tingkat permintaan atas pendidikan tinggi. Akibatnya, tingkat permintaan masyarakatakan pendidikan tingkat universitas menjadi semakin terpacu. Namun penciptaan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi tersebut hanya dapat dipenuhi pada tingkat yang sama tingginya dengan permintaan yang sudah terkena “distorsi” itu apabila masyarakat yang berkesempatan mau dan mampu menanggung beban biaya sosial secara penuh. Dengan terciptanya lonjakan permintaan yang begitu besar, maka biaya-biaya yang harus ditanggung jauh lebih besar dan berat dari pada sekedar biaya pembangunan gedung universitas dan segala fasilitasnya. Sedikit demi sedikit pendidikan tinggi bukan lagi menjadi alat, melainkan menjadi tujuan itu sendiri. Masyarakat bukan hanya memanfaatkan pendidikan, tetapi justru di perbudak oleh

pendidikan. Berikut kurva yang menggambarkan tentang kesenjangan yang semakin melebar antara biaya-biaya dan manfaat sosial versus biaya dan manfaat individual (Todaro, 1998).



(a) Biaya dan manfaat individual



(b) Biaya dan manfaat sosial

Sumber: *Pembangunan Ekonomi (Todaro, 1998)*

### **Gambar 2.2**

#### **Biaya dan Manfaat Sosial Versus Biaya dan Manfaat Individual**

Berdasarkan gambar 2.2 di atas, memberikan ilustrasi tentang kesenjangan yang semakin melebar antara biaya-biaya dan manfaat sosial versus biaya dan manfaat individual. Selain itu juga, kurva di atas juga menggambarkan bagaimana kesenjangan tersebut pada akhirnya akan mengakibatkan terciptanya alokasi sumber daya yang kacau-balau di suatu masyarakat apabila kepentingan-kepentingan pribadi (mereka yang mendewa-dewakan dan terlalu mengandalkan pendidikan, atau tepatnya: ijazah) telah mengalahkan kriteria investasi sosial. Pada kurva 2.2 (a) di atas, individual yang diharapkan dan biaya individual yang aktual dihubungkan dengan periode atau waktu yang dihabiskan untuk bersekolah (dalam satuan tahun). Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan sehingga lebih besar dari biaya-biaya pribadi yang harus dikeluarkannya. Untuk memaksimalkan selisih antara pendapatan yang diharapkan dengan biaya-biaya yang diperkirakan akan muncul atau tingkat pengembalian individual dari investasi pendidikan (*private rate of return to investment in education*), maka strategi optimal yang tersedia bagi orang yang bersangkutan adalah dengan berusaha menempuh pendidikan yang setinggi mungkin. Sedangkan pada kurva 2.2 (b), dimana manfaat-manfaat

sosial dan biaya-biaya sosial yang mengukur waktu yang telah dihabiskan untuk bersekolah (dalam satuan tahun). Nampak bahwa kurva manfaat sosial mula-mula menanjak secara tajam. Gerakan ini mencerminkan terjadinya perbaikan pada tingkat produktivitas dari katakanlah petani-petani kecil, juru hitung, tukang-tukang batu, dan berbagai jenis profesi lainnya yang orang-orangnya hanya menerima sedikit pendidikan dasar (*basic education*) dan latihan-latihan kerja yang serba sederhana. Setelah itu manfaat sosial marjinal (*marginal social benefits*) menurun, sedangkan kurva manfaat sosial terus saja meningkat sehubungan dengan naiknya tingkat pendidikan, walaupun dengan laju pertumbuhan yang semakin menurun (hal tersebut di perlihatkan oleh semakin menurunnya kecuraman kurva manfaat sosial itu). Sebaliknya, kurva biaya sosial menunjukkan tingkat pertumbuhan yang rendah pada awal tahun pendidikan (pendidikan tingkat dasar) dan kemudian meningkat semakin cepat untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi (bentuk kurvanya semakin curam). Peningkatan biaya sosial marjinal pasca-pendidikan dasar yang sangat cepat itu terutama disebabkan oleh biaya modal yang jauh lebih mahal dan semakin meningkatnya biaya pendidikan di perguruan tinggi (misalnya, biaya gedung dan peralatan) dan yang lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa pendidikan menengah dan tinggi (pasca

sekolah dasar) dihampir semua negara berkembang memperoleh subsidi yang sangat besar dari pemerintah (Todaro, 1998).

**e. Hubungan Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Mankiw dan Wilson (2014) mengukur jumlah pengangguran adalah tugas badan statistik negara yang menghimpun data pengangguran dan aspek-aspek pasar tenaga kerja lain, seperti jenis pekerjaan, jam kerja rata-rata dan durasi pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) negara biasanya mengelompokkan orang dewasa pada setiap rumah tangga yang disurvei kedalam salah satu kategori berikut, yaitu: bekerja, pengangguran dan tidak termasuk angkatan kerja. Setelah mengelompokkan seluruh individu yang disurvei kedalam tiga kategori tersebut, badan statistik negara menghitung berbagai statistik untuk merangkum kondisi angkatan kerja.

Angkatan kerja (*labor force*) adalah jumlah orang yang bekerja dan tidak bekerja :

Angkatan Kerja = Jumlah orang yang bekerja + Jumlah yang tidak bekerja

Tingkat pengangguran (*unemployment rate*) adalah persentase angkatan kerja yang tidak bekerja:

Tingkat Pengangguran = Jumlah orang yang tidak bekerja / Populasi

Setelah itu, tingkat pengangguran untuk seluruh populasi penduduk dewasa dan untuk kelompok yang lebih sempit, seperti laki-laki dan perempuan, dapat dihitung. Survei serupa terhadap rumah tangga juga digunakan untuk memperoleh data partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor-force participation rate*) mengukur persentase jumlah populasi penduduk dewasa yang termasuk kedalam angkatan kerja.

$$\text{Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja} = \frac{\text{Angkatan Kerja}}{\text{Populasi Penduduk Dewasa}} \times 100$$

Statistik ini memberikan informasi tentang jumlah populasi yang memilih untuk berpartisipasi menjadi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja, sama seperti pengangguran, dihitung baik untuk populasi seluruh penduduk dewasa maupun kelompok populasi lain yang lebih spesifik.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan konsep pengangguran, antara lain: neo klasik dan neo keynesian. Neo klasik menjelaskan pengangguran menjadi pengangguran sukarela dan pengangguran terpaksa. Pengangguran sukarela muncul karena kebijakan pemerintah meningkatkan tunjangan pengangguran menyebabkan *marginal cost* mencari pekerjaan menjadi lebih murah sehingga lebih banyak pekerjaan yang akan dicari. Pada akhirnya durasi mencari pekerjaan menjadi lebih lama yang berarti meningkatkan pengangguran. Sedangkan pengangguran terpaksa

dapat terjadi dari kebijakan pemerintah menetapkan tingkat upah. Sementara itu, neo keynesian menjelaskan pengangguran dengan teori efisiensi upah dan teori *insider-outsider*. Teori efisiensi upah mengatakan bahwa perusahaan akan menetapkan tingkat upah pada saat elastisitas upah terhadap *effort* adalah satu dan menetapkan tenaga kerja yang diminta pada saat  $MRP = w$ . Pengangguran dapat terjadi karena keuntungan perusahaan menurun akibat dari penurunan upah yang menyebabkan penurunan *effort* pekerja. Teori *insider-outsider* mengatakan bahwa pengangguran akan terjadi apabila selisih perbedaan upah *insider* dengan *outsider* lebih tinggi dari pada biaya *turnover*. Dengan kata lain perusahaan akan lebih mudah untuk merekrut *outsider* dari pada mempertahankan *insider*, sehingga *insider* akan dipecat dan terjadi pengangguran (Santosa, 2012).

Pengertian dari pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut Sukirno (1994) dalam buku Pujualwanto (2014), pengangguran dapat dipilah menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan cirinya. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran terdiri dari: pengangguran normal, pengangguran siklikal, pengangguran struktural dan pengangguran teknologi. Berdasarkan

cirinya pengangguran terdiri dari: pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim dan setengah menganggur.

#### 1) Pengangguran Normal

Pengangguran normal atau pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi sebanyak dua atau tiga persen. Para penganggur ini tidak bekerja bukan karena tidak dapat memperoleh pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Pengangguran ini diakibatkan oleh pengusaha yang susah memperoleh pekerja, akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

#### 2) Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang terjadi karena tidak stabilnya perekonomian. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Sehingga banyak pekerja baru yang digunakan dalam proses produksi. Akan tetapi pada masa

lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya barang yang tersedia. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

### 3) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: terwujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing dan ekspor produksi sudah sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain.

### 4) Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Seperti halnya ditemukannya inovasi pada sektor pertanian dan sektor industri. Pada sektor pertanian, kehadiran teknologi akan telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lainnya. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Hal tersebut akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja sehingga menimbulkan terjadinya pengangguran teknologi.

#### 5) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Hal tersebut mengakibatkan dalam perekonomian akan semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu sehingga dikatakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka sebagai wujud akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

#### 6) Pengangguran Tersembunyi

Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran yang terjadi di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja tergantung pada banyak faktor. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja dalam proses produksi lebih banyak tenaga kerja dari yang sebenarnya diperlukan.

#### 7) Pengangguran Bermusim

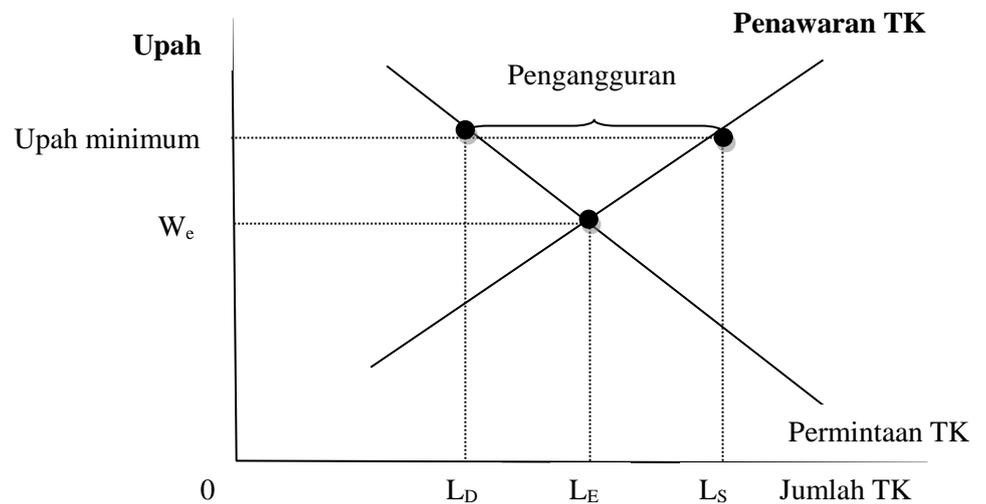
Pengangguran bermusim adalah pengangguran yang disebabkan oleh musim hujan atau kemarau. Pengangguran ini terdapat pada sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Sedangkan pada musim kemarau para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Apabila dalam masa tersebut para petani dan nelayan tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

## 8) Setengah Menganggur

Setengah menganggur adalah pengangguran yang terjadi pada kondisi migrasi dari desa ke kota di negara-negara yang sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Disamping itu, ada juga yang tidak menganggur, tetapi tidak juga bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu atau dua hari selama seminggu atau satu hingga empat jam sehari. Jenis pengangguran yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan digolongkan sebagai setengah menganggur atau dinamakan *underemployment*.

Menurut Mankiw dan Wilson (2014) untuk memahami pengangguran struktural, yang pertama dilakukan adalah meninjau bagaimana pengangguran dapat terjadi akibat peraturan upah minimum. Analisis upah minimum merupakan langkah awal yang tepat digunakan untuk memahami sebagian alasan lain terjadinya pengangguran struktural. Pengangguran struktural yang terjadi akibat upah yang berada di atas upah keseimbangan, sedangkan pengangguran friksional terjadi akibat proses pencarian kerja. Apabila pencarian kerja menjadi alasan terjadinya pengangguran, para pekerja mencari

pekerjaan yang paling sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Sebaliknya, apabila upah berada di atas titik keseimbangan, jumlah penawaran tenaga kerja melebihi jumlah permintaan, dan para pekerja menjadi pengangguran karena mereka menunggu adanya lowongan pekerjaan.



Sumber: Pengantar Ekonomi Makro (Mankiw dan Wilson, 2014)

### Gambar 2.3

#### Pengangguran

#### Akibat Upah di Atas Titik Keseimbangan

Gambar 2.3 di atas menggambarkan pengangguran akibat upah di atas titik keseimbangan. Di pasar tenaga kerja ini, upah pada titik keseimbangan penawaran dan permintaan adalah  $W_E$ . Pada upah keseimbangan ini, jumlah penawaran dan permintaan tenaga kerja adalah sama dengan  $L_E$ . Sebaliknya,

jika upah tersebut dipaksa agar tetap berada di atas titik keseimbangan, mungkin karena peraturan upah minimum, jumlah penawaran tenaga kerja meningkat menjadi  $L_D$ . Surplus tenaga kerja yang dihasilkan,  $L_s - L_D$ , adalah pengangguran.

Pengangguran sangat erat kaitannya terhadap indeks pembangunan manusia. Pengangguran adalah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran ditandai dengan tingginya permintaan tingkat angkatan kerja sedangkan penawaran lapangan pekerjaan itu sedikit. Sempitnya lapangan pekerjaan membuat tenaga kerja yang kurang berkualitas akan kehilangan pekerjaannya, sehingga membuat tenaga kerja tersebut tidak memiliki penghasilan dan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pelatihan tenaga kerja dan rendahnya pendidikan yang dimiliki tenaga kerja menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran. Kehadiran teknologi dari negara maju memberikan beberapa dampak bagi negara berkembang. Selain dikarenakan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh negara berkembang, lahirnya inovasi teknologi akan memberikan dampak negatif maupun positif bagi masyarakat. Negatifnya adalah apabila mereka tidak mampu mengoperasikan teknologi mereka akan kehilangan pekerjaan, sedangkan positifnya adalah apabila

mereka mampu mengoperasikan teknologi tersebut akan menciptakan kreativitas dan keterampilan yang berdaya guna tinggi sehingga mereka memiliki pendapatan yang tinggi.

## B. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini akan dibahas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai indeks pembangunan manusia yang mendasari pemikiran dan pertimbangan dalam menyusun penelitian ini. Berikut tabel penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, tahun, dan judul	Metode Analisis	Variabel	Kesimpulan
1.	Nur Feriyanto, 2016, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Tenaga Kerja, Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia Per Provinsi di Indonesia.	Metode <i>Fixed Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Tenaga Kerja</li> <li>▪ Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>▪ PMA</li> <li>▪ PMDN</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>2. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan.</li> <li>3. Variabel PMA berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>4. Variabel PMDN berpengaruh positif dan signifikan.</li> </ol>
2.	Tutik Yuliani dan Novita Sarigih, 2013, Determinan Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	Metode GLS ( <i>Generalized Least Square</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengangguran</li> <li>▪ Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>▪ Pengeluaran pemerintah</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan.</li> <li>2. Variabel Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan.</li> <li>3. Variabel Pengeluaran pemerintah memiliki</li> </ol>

				pengaruh yang positif dan signifikan.
3.	Adelfina dan I Made Jember, 2014, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005-2013.	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>▪ Kemiskinan</li> <li>▪ Belanja Daerah</li> <li>▪ Indeks Pembangunan Manusia</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>2. Variabel Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan.</li> <li>3. Variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan.</li> </ol>
4.	Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyingsih, 2015, Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kab/Kota di Yogyakarta).	Metode <i>Random Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PDRB</li> <li>▪ Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan</li> <li>▪ Pengeluaran Pemerintah untuk Fasilitas Umum</li> <li>▪ Rasio Gini</li> <li>▪ Jumlah Penduduk Miskin</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan.</li> <li>2. Variabel Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>3. Variabel Pengeluaran Pemerintah untuk Fasilitas Umum berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>4. Variabel Rasio Gini berpengaruh negatif dan signifikan.</li> <li>5. Variabel Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan signifikan.</li> </ol>
5.	Anang Wijayanto dkk, 2015, Analisis Pengaruh Pengeluaran Kesehatan dan Pendidikan serta PDRB per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi terhadap Kabupaten/Kota di Jawa Timur).	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengeluaran Kesehatan</li> <li>▪ Pengeluaran Pendidikan</li> <li>▪ PDRB</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel pengeluaran kesehatan berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>2. Variabel pengeluaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>3. Variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan.</li> </ol>
6.	Ima Amaliah, 2004, Pengaruh	Metode <i>Fixed</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angka Harapan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Angka Harapan Hidup berpengaruh positif</li> </ol>

	Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Ekonomi Dati II di Jawa Barat, 1999-2003.	<i>Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hidup</li> <li>▪ Gini Rasio</li> <li>▪ Pendapatan Perkapita</li> </ul>	<p>dan signifikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Variabel Gini Ratio berpengaruh negatif dan signifikan.</li> <li>3. Variabel Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan.</li> </ol>
7.	Matthew Sanderson, 2009, Migrasi Internasional dan Pembangunan Manusia di Negara Tujuan: Analisis Lintas-Nasional Negara belum maju, 1970-2005.	Metode <i>Fixed Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Migrasi</li> <li>▪ Globalisasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Migrasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</li> <li>2. Variabel Globalisasi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</li> </ol>
8.	Ady Soejoto, Waspodo Tjipto Subroto dan Suyanto, 2015, Kebijakan Desentralisasi Fiskal dalam mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dana desentralisasi</li> <li>▪ Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>▪ Belanja Publik</li> <li>▪ Penurunan Jumlah Penduduk Miskin</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Dana Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>3. Variabel Belanja Publik berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>4. Variabel Penurunan Jumlah Penduduk Miskin berpengaruh positif dan signifikan.</li> </ol>
9.	Michael Grimm, 2008, Indeks Pembangunan Manusia dari Golongan Pendapatan.	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketimpangan Pendapatan</li> <li>▪ Kematian Diferensial</li> <li>▪ Ketidakstrataan dalam Pendidikan</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Ketimpangan Pendapatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</li> <li>2. Variabel Kematian Diferensial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</li> <li>3. Variabel Ketidakstrataan dalam Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</li> </ol>
10.	Jengher Chen, 2012, Kelahiran Global dan Transisi Budaya	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelahiran Global</li> <li>▪ Transisi Budaya</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Kelahiran Global berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.</li> <li>2. Variabel Transisi Budaya</li> </ol>

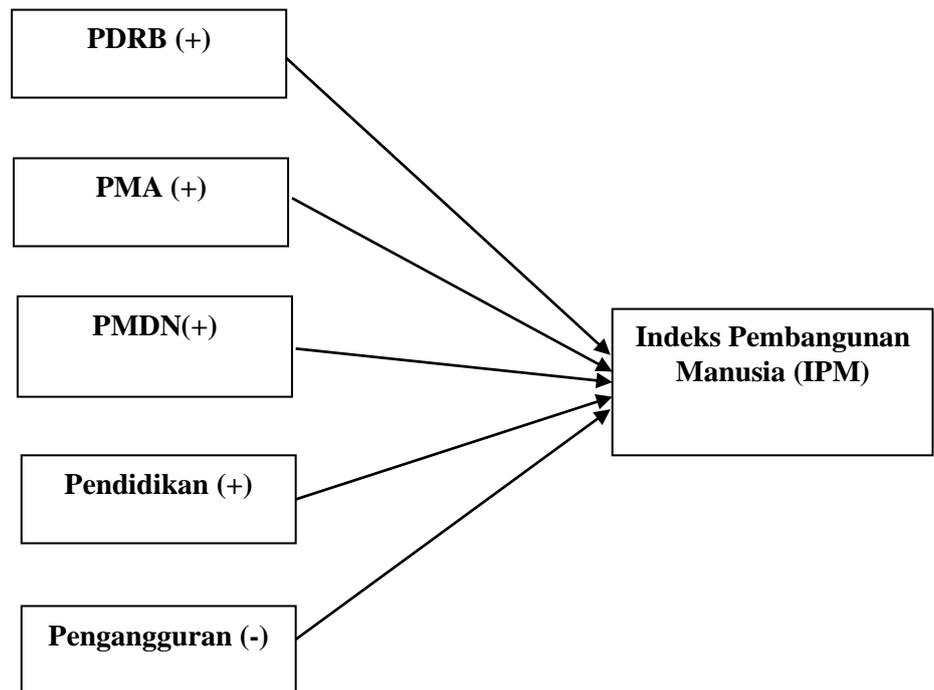
	mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia.			berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
11.	Dwi Maumere Putra dan Vita Ratnasari, 2015, Permodelan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur.	Metode Regresi Logistik Ridge	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angka Kematian Bayi</li> <li>▪ Persentase Keluhan Kesehatan</li> <li>▪ Jumlah Sarana Kesehatan</li> <li>▪ Angka Buta Huruf (10 tahun ke atas)</li> <li>▪ Angka Partisipasi Sekolah (SMA)</li> <li>▪ Rasio Guru (SMA)</li> <li>▪ Rasio Sekolah (SMA)</li> <li>▪ Persentase Penduduk Miskin</li> <li>▪ PDRB</li> <li>▪ Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>▪ Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas</li> <li>▪ Pengangguran Terbuka</li> <li>▪ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Angka Kematian Bayi berpengaruh negatif dan signifikan.</li> <li>2. Variabel Persentase Keluhan Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.</li> <li>3. Variabel Jumlah Sarana Kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan.</li> <li>4. Variabel Angka Buta Huruf berpengaruh negatif dan signifikan.</li> <li>5. Variabel Angka Partisipasi Sekolah berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>6. Variabel Rasio Guru (SMA) berpengaruh positif dan tidak signifikan.</li> <li>7. Variabel Rasio Sekolah (SMA) berpengaruh positif dan tidak signifikan.</li> <li>8. Variabel Persentase Penduduk Miskin berpengaruh negatif dan tidak signifikan.</li> <li>9. Variabel PDRB berpengaruh positif dan tidak signifikan.</li> <li>10. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan.</li> <li>11. Variabel Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas berpengaruh positif dan tidak signifikan.</li> <li>12. Variabel Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan.</li> <li>13. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan.</li> </ol>
12.	Nur Isa Pratowo, 2010, Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Indeks	Metode <i>Random Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belanja daerah</li> <li>▪ Gini Ratio</li> <li>▪ Proporsi Pengeluaran non Makanan</li> <li>▪ Rasio</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>2. Variabel Gini Ratio berpengaruh negatif dan signifikan.</li> </ol>

	Pembangunan Manusia.		Ketergantungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Proporsi Pengeluaran non Makanan berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>Rasio Ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan.</li> </ol>
13.	Ida Ayu Candra Yunita Sari dan Niluh Supadmi, 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan Asli Daerah</li> <li>Alokasi Belanja Modal</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>Variabel Alokasi Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan.</li> </ol>
14.	Nur Baeti, 2013, Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.	Metode <i>Fixed Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangguran</li> <li>Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Pengeluaran Pemerintah</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Variabel Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan.</li> <li>Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.</li> <li>Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan.</li> </ol>
15.	Novita Dewi, 2017, Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau.	Metode Regresi Linear Berganda	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemiskinan</li> <li>Pertumbuhan Ekonomi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Variabel Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan.</li> <li>Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan.</li> </ol>

### C. Kerangka Pemikiran

Pada pembahasan ini, atas dasar pemikiran teoritis dan beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai berbagai hubungan antara variabel

independen (PDRB, PMA, PMDN, pendidikan dan pengangguran) dengan variabel dependen (Indeks Pembangunan Manusia), maka faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di setiap provinsi di Indonesia dapat di gambarkan dengan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.4**  
Kerangka Berfikir

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan paparan di atas mulai dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka penelitian, maka dapat diajukan penelitian sebagai berikut:

1. Diduga PDRB berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga puluh Provinsi di Indonesia.
2. Diduga PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga puluh Provinsi di Indonesia.
3. Diduga PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga puluh Provinsi di Indonesia.
4. Diduga pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga puluh Provinsi di Indonesia.
5. Diduga pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di tiga puluh Provinsi di Indonesia.